

IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN SOSIAL DALAM PEMENUHAN KEBUTUHAN LANSIA DI DESA KASIYAN KABUPATEN JEMBER

IMPLEMENTATION OF THE SOCIAL ASSISTANCE PROGRAM IN MEETING THE NEEDS OF THE ELDERLY IN KASIYAN VILLAGE, JEMBER REGENCY

Dian Ayu Wulandari¹, Itok Wicaksono²

^{1,2} Universitas Muhammadiyah Jember

^{1,2} Ilmu Pemerintahan

e-mail: dianayuwulandari1909@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji bagaimana Program Bantuan Sosial membantu lansia di Desa Kasiyan di Kecamatan Puger, Kabupaten Jember. Fokus utama penelitian adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh bantuan sosial melalui program Bantuan Langsung Tunai (BLT) terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat penerima manfaat, khususnya lansia. Penelitian juga akan mengkaji komponen yang mempengaruhi keberhasilan program. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif. Kepala desa, perangkat desa, dan penerima bantuan diwawancarai secara menyeluruh untuk mendapatkan data. Penelitian ini juga menggunakan observasi dan analisis dokumen untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana bantuan sosial diterapkan. Berdasarkan temuan analisis data menunjukkan bahwa kejelasan informasi, koordinasi antar pihak, hambatan komunikasi, upaya peningkatan komunikasi, dampak komunikasi, sumber daya manusia, sumber daya finansial, sumber daya informasi, sumber daya waktu, sikap dan komitmen pelaksana program, respon terhadap tantangan dan hambatan, hubungan dengan penerima manfaat, koordinasi dan kolaborasi dengan pihak terkait, motivasi dan etos kerja, evaluasi dan perbaikan berkelanjutan, hierarki dan pembagian tugas yang jelas, prosedur dan mekanisme kerja yang terstandarisasi, koordinasi antar unit yang efektif, sistem pelaporan dan monitoring yang terstruktur, alokasi sumber daya dan infrastruktur pendukung, transparansi dan akuntabilitas yang tinggi menunjukkan bahwa meskipun program BLT telah dilaksanakan terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaannya.

Kata kunci: Implementasi; Bantuan sosial; Lansia; Kesejahteraan sosial.

ABSTRACT

This research examines how the Social Assistance Program helps the elderly in Kasiyan Village in Puger Sub-district, Jember Regency. The main focus of the research is to determine how much influence social assistance through the Direct Cash Transfer (BLT) program has on the welfare level of the beneficiary community, especially the elderly. The research will also examine the components that influence the success of the program. This research was conducted qualitatively using a descriptive approach. The village head, village officials, and beneficiaries were interviewed thoroughly to obtain data. The research also used observation and document analysis to gain a better understanding of how social assistance is implemented. Based on the findings of the data analysis, it shows that clarity of information, coordination between parties, communication barriers, efforts to improve communication, the impact of communication, human resources, financial resources, information resources, time resources, attitudes and commitment of program implementers, response to challenges and obstacles, relationships with beneficiaries,

coordination and collaboration with related parties, motivation and work ethic, continuous evaluation and improvement, clear hierarchy and division of tasks, standardized work procedures and mechanisms, effective coordination between units, structured reporting and monitoring systems, resource allocation and supporting infrastructure, high transparency and accountability.

Keywords: *Implementation; Social assistance; Elderly; Social welfare.*

PENDAHULUAN

Bantuan langsung tunai (BLT) merupakan salah satu program dari pemerintah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan, terutama bagi keluarga yang rentan dan berpenghasilan rendah. Adanya kriteria penerima yang jelas dan dapat diukur merupakan keunggulan dari program Bantuan langsung tunai. Pemerintah mempertimbangkan kondisi ekonomi, jumlah anggota keluarga, dan efek darurat. Untuk memastikan bantuan tersebut tepat sasaran, proses verifikasi data penerima bantuan dilakukan secara sistematis. Dengan demikian, penting bagi pemerintah dan seluruh bagian masyarakat untuk terus mendukung dan memperkuat program BLT agar dapat mencapai lebih banyak orang.

Di Kabupaten Jember, pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa diatur melalui regulasi yang mengacu pada Peraturan Daerah. Salah satu dasar hukumnya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa, yang memberikan kerangka umum mengenai pengelolaan keuangan Desa, termasuk penyaluran BLT (Daerah, 2015). Selain itu, terdapat Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jember, yang memberikan pedoman lebih spesifik terkait mekanisme pengelolaan keuangan desa, termasuk penyaluran BLT Dana Desa. Adapun peraturan kepala desa Nomor 4 Tahun 2020 tentang penetapan keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai dana desa tahun anggaran 2020 (Peraturan Kepala Desa Kasiyan No.4 Tahun 2020, 2020).

Program Bantuan Langsung Tunai di Indonesia dimulai dengan serangkaian langkah yang terorganisir dan sistematis, termasuk sosialisasi, verifikasi nama Rumah Tangga Sasaran, pembagian kartu BLT, pencairan dana, dan diakhiri dengan laporan dan evaluasi. Program BLT diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan lansia dan mengurangi kemiskinan di Indonesia dengan cara yang sistematis. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menangani masalah sosial dan mendukung kesejahteraan umum (Rangkuti, 2024).

Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2019 menunjukkan bahwa di Indonesia ada 25,7 juta orang berusia 60 tahun ke atas atau lansia, atau sekitar 9,6% dari seluruh populasi. Jumlah ini diperkirakan meningkat sekitar 10% pada tahun 2020 dan menjadi 20% pada tahun 2024, dengan perkiraan peningkatan menjadi 74 juta orang pada tahun 2050, atau sekitar 25% dari seluruh populasi. Kehidupan yang jauh dari tingkat kesejahteraan yang layak dan di bawah garis kemiskinan adalah masalah yang dihadapi oleh kelompok ini (TNP2K, 2020). Lansia sering menghadapi berbagai masalah, termasuk penurunan kemampuan fisik dan mental, yang membuat mereka rentan terhadap risiko sosial dan ekonomi. Data menunjukkan bahwa mayoritas lansia kesulitan memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan dan perawatan medis. Laporan dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa jumlah orang tua di Indonesia diperkirakan akan mencapai 30,9 juta orang, atau 11,1% dari total penduduk, pada tahun 2023 (Wahyudi, 2024).

BLT sangat penting bagi lansia yang terlantar karena banyak dari mereka hidup dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil dan seringkali tidak memiliki sumber pendapatan tetap. Adanya BLT memungkinkan pemerintah memberikan uang langsung untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari seperti makanan, obat-obatan, dan perawatan kesehatan. Penyaluran bantuan sosial yang dilakukan secara teratur adalah bukti lebih lanjut dari keberhasilan program ini. Program ini tidak hanya memberikan dukungan finansial

tetapi juga menciptakan sistem pendampingan sosial bagi penerima manfaat. Dalam hal ini, Dinas Sosial secara aktif memantau data penerima bantuan dan membantu memastikan bahwa bantuan sampai ke orang yang benar-benar membutuhkannya. Dengan cara ini, program BLT mendorong keberdayaan sosial lansia, membantu mereka memperbaiki kualitas hidup dan bertahan hidup. Metode holistik ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan lansia di Indonesia secara signifikan, memberikan mereka kesempatan untuk menjalani hidup dengan lebih baik dan mendapatkan perhatian yang layak dari masyarakat dan pemerintah (Rangkuti, 2024).

Desa Kasiyan memiliki jumlah lansia yang signifikan, hampir 2,7% dari total penduduk (Timur, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan sosial yang lebih baik diperlukan untuk memenuhi kebutuhan kelompok ini yang unik. Lanjut usia seringkali menghadapi kesulitan untuk mendapatkan sumber daya dan layanan yang cukup. Mayoritas orang di Desa Kasiyan adalah petani, dan gaji mereka mungkin tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar orang tua (Kasiyan, 2024). Oleh karena itu, sangat penting untuk memberikan dukungan finansial melalui BLT agar orang tua dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Selain itu, lansia rentan terhadap masalah kesehatan mental seperti depresi, yang dapat diperburuk oleh isolasi dan kekurangan dukungan sosial.

Mulai tahun 2023, sebanyak 55 keluarga di Desa Kasiyan terdaftar sebagai penerima manfaat BLT dengan besaran bantuan Rp 300.000 per bulan selama setahun penuh. Pemerintah desa memprioritaskan lansia tunggal dan lansia miskin ekstrem sebagai penerima bantuan. Penyaluran BLT melibatkan kerja sama antara pemerintah desa, RT, RW, dan Kaur Kesra. Proses penyaluran juga diawasi ketat oleh BPD, pendamping desa, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Kepala desa sebagai pemimpin tertinggi desa bertanggung jawab penuh atas seluruh kegiatan penyaluran BLT ini. Penyaluran bantuan dapat dilakukan secara efisien dan tepat sasaran melalui kerja sama yang solid antara pemerintah desa dan masyarakat serta pengawasan yang ketat. Ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengubah masyarakat menjadi lebih inklusif dan mendukung kelompok rentan.

Komunikasi yang baik antara pemerintah desa, penerima manfaat, dan pihak terkait lainnya merupakan komponen penting dalam penyaluran program BLT. Komunikasi yang efektif memastikan bahwa informasi program disampaikan dengan tepat dan jelas, sehingga masyarakat dapat memahami dan memanfaatkan bantuan yang tersedia. Selain itu, ketersediaan sumber daya yang memadai, baik secara manusia maupun finansial, sangat penting untuk pelaksanaan program ini. Tanpa sumber daya yang cukup, pelaksanaan BLT dapat menghambat penyediaan bantuan. Kelancaran proses pengambilan keputusan dan penyediaan bantuan sangat dipengaruhi oleh struktur birokrasi yang efektif.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Kesejahteraan Sosial

Menurut Indonesia (2009) Kesejahteraan Sosial merupakan suatu kondisi di mana kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara terpenuhi, sehingga mereka dapat hidup secara layak dan memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri serta menjalankan fungsi sosialnya. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah suatu upaya yang terencana, terkoordinasi, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat melalui berbagai bentuk pelayanan sosial. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang mencakup rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Konsep kesejahteraan sosial mencakup banyak aspek kehidupan yang memengaruhi kualitas hidup individu dan masyarakat. Beberapa komponen penting dari gagasan ini yaitu:

- a. Kesehatan: Akses terhadap layanan kesehatan berkualitas tinggi dengan biaya rendah.
- b. Ekonomi: Kemampuan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti sandang, pangan, dan papan.

- c. Pendidikan: Kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang baik dan berkembang.
- d. Lingkungan: Perlindungan lingkungan hidup yang bersih dan sehat.
- e. Keadilan Sosial: kesetaraan kesempatan dan sumber daya bagi setiap anggota masyarakat.

Menurut perspektif ini, kesejahteraan sosial diukur dari berbagai aspek: sosial, fisik, spiritual, intelektual, dan lingkungan selain materi atau ekonomi. Ini menunjukkan bahwa kesejahteraan merupakan suatu kondisi yang mencakup semua aspek kehidupan manusia secara keseluruhan. Selain itu, kesejahteraan sosial dapat didefinisikan sebagai sistem terorganisir dari pelayanan sosial yang membantu setiap individu dan kelompok untuk mencapai standar hidup yang memuaskan serta hubungan sosial dan personal yang baik. Ini termasuk berbagai program dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup umum masyarakat. Memastikan bahwa lansia dapat hidup dengan baik, mandiri, dan produktif, perlu ada banyak aspek penting dari kesejahteraan sosial lansia. Beberapa dimensi utama yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial orang tua adalah sebagai berikut:

a. Dimensi Sosial:

Interaksi sosial: Orang tua harus memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan orang lain, keluarga, dan masyarakat. Mereka dapat meningkatkan kualitas hidup mereka dengan mengikuti kegiatan sosial seperti silaturahmi, kunjungan, dan berpartisipasi dalam kegiatan komunitas. Dukungan Emosional: Teman dan keluarga harus menawarkan dukungan untuk membantu orang tua mengurangi depresi dan kesepian. Berpartisipasi dalam kegiatan seni atau hobi dapat meningkatkan hubungan sosial (Katriana, 2019).

b. Dimensi Fisik

Kesehatan: Akses terhadap fasilitas kesehatan yang berkualitas dan aktivitas fisik seperti olahraga sangat penting dalam menjaga kesehatan fisik para lansia. Selain itu, pemeriksaan kesehatan secara rutin juga diperlukan untuk mengidentifikasi potensi masalah kesehatan sedini mungkin. (Katriana, 2019).

c. Dimensi Spiritual

Kesejahteraan Spiritual: Pelayanan keagamaan dan aktivitas lainnya yang mendukung kesejahteraan spiritual dapat memberikan ketenangan dan makna pada kehidupan orang tua. Dimensi ini menjadi salah satu bagian yang sangat penting dalam menjaga kesejahteraan emosional mereka (Katriana, 2019).

d. Dimensi Intelektual

Pendidikan dan Pembelajaran Berkelanjutan: Untuk mencegah penurunan fungsi kognitif seperti demensia, orang tua harus terlibat dalam kegiatan yang merangsang pikiran, seperti kelas atau diskusi kelompok (Katriana, 2019).

e. Dimensi Lingkungan

Kondisi Tempat Tinggal: Memberikan lingkungan fisik yang aman dan ramah bagi lansia sangat penting. Ini mencakup aksesibilitas perumahan dan fasilitas umum yang sesuai dengan kebutuhan mereka (Katriana, 2019).

Kesejahteraan sosial juga dapat didefinisikan sebagai sistem terorganisir dari pelayanan sosial yang membantu setiap individu dan kelompok untuk mencapai standar hidup yang memuaskan serta hubungan sosial dan personal yang baik, ini termasuk berbagai program dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup umum masyarakat. Memastikan bahwa lansia dapat hidup dengan baik, mandiri, dan produktif, perlu ada banyak aspek penting dari kesejahteraan sosial lansia.

Hubungan yang signifikan antara program bantuan sosial dengan kesejahteraan lansia (Agustine & Handoyo, 2022) menunjukkan bahwa program bantuan sosial memiliki pengaruh sebesar 50,8% terhadap peningkatan derajat kualitas hidup lansia. ini berarti bahwa bantuan yang diberikan melalui program bantuan sosial berkontribusi positif terhadap berbagai aspek kehidupan lansia, termasuk kebutuhan sehari-hari, kesehatan, dan kesejahteraan psikologis mereka. Bantuan sosial tidak hanya memberikan dukungan

keuangan, tetapi juga meningkatkan akses ke layanan kesehatan, mengurangi isolasi sosial, dan meningkatkan rasa percaya diri lansia. Pengaruhnya beragam, dengan dampak langsung seperti pemenuhan kebutuhan dasar dan dampak tidak langsung seperti peningkatan akses ke layanan sosial lainnya.

2. Kebijakan Publik

Kebijakan publik dipandang sebagai tindakan dari pemerintah, menurut pandangan George C. Edwards III dan Ira Sharkansky, yaitu: “Kebijakan publik adalah apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang dapat ditetapkan dalam peraturan-peraturan perundang-undangan atau dalam kebijakan pemerintah yang berbentuk pidato-pidato dan wacana yang diungkapkan pejabat politik dan pejabat pemerintah yang segera ditindaklanjuti dengan program-program dan tindakan pemerintah”. Senada dengan pandangan Thomas R. Dye, mengemukakan kebijakan publik sebagai “apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan.” Keputusan untuk bertindak atau tidak bertindak juga termasuk dalam kebijakan publik, karena hal tersebut merupakan upaya untuk mencapai tujuan dan memiliki dampak yang setara dengan keputusan untuk melakukan suatu tindakan terhadap masyarakat (Yaw, 2008).

Kebijakan publik dipandang sebagai rancangan program-program yang dikembangkan pemerintah untuk mencapai tujuan, menurut James E. Anderson: “Kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah.” George C. Edwards III dan Ira Sharkansky: Kebijakan publik adalah “suatu tindakan pemerintah yang berupa program-program pemerintah untuk pencapaian sasaran atau tujuan” Menurut kedua perspektif yang berbeda mengenai kebijakan publik, pemerintah merupakan satu-satunya pihak yang dapat membuat kebijakan public, pihak-pihak lain juga dikenal sebagai aktor kebijakan publik, hanya dapat mempengaruhi proses kebijakan publik dalam batas kewenangan mereka sendiri.(Yaw, 2008).

Menurut Roy V. Salomo, Fasilitator IIPG dan dosen di Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) Universitas Indonesia, kebijakan publik terdiri dari aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah. “Kebijakan publik adalah aturan yang dibuat untuk pada akhirnya mengikat kehidupan kita sebagai masyarakat. Sebagai anggota masyarakat pun penting bagi kita untuk mengetahui kebijakan publik karena apa yang diatur di dalam kebijakan publik itu adalah kita, yang dalam artian singkatnya bahwa nasib kita ada di kebijakan publik” (Wahyuni, 2022).

3. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi program bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan lansia di Desa Kasiyan, Kabupaten Jember, melalui tahapan implementasi kebijakan publik menurut (George C. Edward III, 1980) yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi sangat relevan untuk dianalisis dan dikaitkan.

a) Komunikasi

Agar implementasi kebijakan berjalan dengan efektif, para pelaksana yang bertanggung jawab dalam menjalankan keputusan harus memahami dengan jelas apa yang harus dilakukan. Instruksi untuk menerapkan kebijakan harus diberikan kepada orang yang tepat, dan arahan yang diberikan harus jelas, akurat, serta konsisten. Jika kebijakan yang ingin diterapkan oleh para pengambil keputusan tidak dijelaskan secara jelas, pihak-pihak yang menjadi sasaran kebijakan dapat salah menafsirkannya. Selain itu, kurangnya komunikasi dapat memungkinkan para pelaksana untuk mencoba mengubah kebijakan umum menjadi tindakan yang lebih spesifik. Namun, kebebasan ini belum tentu digunakan untuk mendukung tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh para pengambil keputusan awal.

Untuk melihat implementasi yang berhasil, ukuran dan tujuan kebijakan harus dipahami secara mendalam oleh mereka yang bertanggung jawab untuk mencapainya. Oleh karena itu, penting untuk menyampaikan ukuran dan tujuan kebijakan secara jelas dan tepat kepada para pelaksana. Hal ini memastikan bahwa para pelaksana kebijakan dapat memahami ukuran dan tujuan kebijakan dengan akurat. Konsistensi atau keseragaman dalam komunikasi juga perlu terus dijaga. Komunikasi dalam organisasi adalah hal yang kompleks dan rumit, di mana informasi bisa sengaja ditahan untuk tujuan

tertentu atau disebarkan sesuai dengan kebutuhan.

b) Sumber Daya

Komponen sumber daya meliputi sumber daya manusia, finansial, waktu, dan informasi yang memadai serta relevan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan dan memenuhi kebutuhan terkait dalam menjalankan program. Diperlukan otoritas yang dapat memastikan program berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, serta ketersediaan sumber daya dan sarana pendukung yang memadai untuk melaksanakan kegiatan program. Ketidacukupan sumber daya manusia, baik dari segi jumlah maupun kompetensi, dapat menyebabkan pengawasan yang lemah dan menghambat pelaksanaan program. Dalam kondisi di mana jumlah pelaksana kebijakan terbatas, peningkatan keterampilan dan kemampuan para pelaksana menjadi sangat penting untuk memastikan program dapat dijalankan dengan baik. Faktor sumber daya memegang peran krusial dalam implementasi kebijakan, yang mencakup sumber daya anggaran dan peralatan sebagai bagian integral dari keberhasilan pelaksanaan program. (Widiprana et al., 2017).

c) Disposisi

Para pelaksana kebijakan tidak hanya harus memahami apa yang harus dilakukan dan memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, tetapi juga harus memiliki keinginan dan keinginan untuk menerapkan kebijakan tersebut. Pada umumnya pelaksana memiliki kebebasan yang cukup besar dalam menerapkan kebijakan. Hal ini disebabkan karena mereka tidak sepenuhnya bergantung pada atasan yang merumuskan kebijakan, serta karena kompleksitas kebijakan itu sendiri. Untuk mencapai keberhasilan dan efisiensi, para pelaksana kebijakan harus memiliki kemauan dan kesukarelaan dalam menjalankan kebijakan. Mereka juga perlu memiliki visi dan tujuan yang selaras dengan tujuan kebijakan. Selain itu, sikap dan komitmen pelaksana dalam melaksanakan kebijakan publik juga turut memengaruhi hasilnya.

Sikap pelaksana dalam pelaksanaan kebijakan publik diharapkan dapat diterapkan sejak tahap awal pelayanan, terutama ketika peraturan telah tersedia. Sikap ini seharusnya tercermin dari pemahaman mereka tentang langkah-langkah yang perlu diambil serta kemampuan mereka untuk melaksanakannya. Dengan demikian, unsur sikap pelaksana dalam implementasi kebijakan diharapkan dapat diwujudkan sejak awal, mulai dari tahap pelayanan, ketersediaan peraturan, hingga penegakan hukum (Anta Kusuma & Simanungkalit, 2022).

d) Struktur Birokrasi

Meskipun sumber daya yang diperlukan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan telah tersedia dan para pelaksana memahami tugas serta cara melaksanakannya, implementasi kebijakan tetap dapat terhambat jika terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi. Agar kebijakan publik dapat dilaksanakan dengan baik, pelaksana harus memiliki struktur birokrasi yang jelas dan terperinci. Struktur organisasi tersebut harus mengikuti standar operasional prosedur (SOP) yang detail dan dapat dijalankan. SOP ini berfungsi sebagai panduan bagi organisasi dan masyarakat dalam mengevaluasi pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan. Untuk memastikan administrasi berjalan secara efektif dan efisien, SOP juga perlu dirancang dengan mempertimbangkan kemudahan dan kesederhanaan dalam proses administrasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Yang bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti yakni Implementasi Program Bantuan Sosial dalam Pemenuhan Kebutuhan Lansia di Desa Kasiyan Kabupaten Jember. Penentuan informan pada penelitian ini di lakukan dengan teknik (purposive sampling), dimana pemilihan dilakukan secara sengaja berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi,

wawancara, dan dokumentasi. Kemudian data dianalisis dengan menggunakan model interaktif dari (Miles et al., 2014) yang menerapkan empat langkah dalam menganalisis data, yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Komunikasi

1) Kejelasan Informasi

Kejelasan informasi menunjukkan bahwa meskipun pemerintah desa telah berusaha menyampaikan informasi program melalui berbagai forum dan pertemuan, masih terdapat kendala pemahaman di kalangan lansia. Banyak lansia yang kesulitan mencerna informasi yang disampaikan, khususnya jika disajikan dalam bentuk tulisan yang formal dan teknis. Penyediaan layanan konsultasi dengan cara pendekatan personal, seperti kunjungan door to door oleh petugas di rumah lansia penerima manfaat menunjukkan adanya upaya untuk mengatasi kesenjangan pemahaman ini.

2) Koordinasi Antar Pihak

Koordinasi antar pihak pemerintah desa, kecamatan, dan kabupaten sudah berjalan, tetapi seringkali terjadi keterlambatan dalam penyampaian informasi, terutama saat ada perubahan kebijakan. Peran tokoh masyarakat dan kepala dusun sangat penting dalam memastikan informasi sampai ke warga. Namun, sering kali terjadi keterlambatan dalam penyampaian informasi, terutama saat ada perubahan kebijakan, yang dapat menghambat komunitas dalam memanfaatkan bantuan yang tersedia.

3) Hambatan Komunikasi

Banyak lansia yang tidak memiliki akses ke teknologi modern seperti smartphone atau internet, sehingga informasi yang disebar melalui media sosial sering kali tidak efektif. Selain itu, ada pula tantangan linguistik, di mana banyak lansia lebih nyaman menggunakan bahasa lokal, sehingga istilah teknis yang digunakan dalam komunikasi resmi dapat membingungkan mereka. Hambatan komunikasi yang signifikan ditemukan dalam bentuk kesulitan pemahaman karena faktor pendidikan dan usia lansia, kendala bahasa dimana banyak lansia lebih nyaman menggunakan bahasa Madura, serta kondisi lansia yang tinggal sendiri sehingga menyulitkan penyampaian informasi.

4) Upaya Peningkatan

Terdapat upaya peningkatan komunikasi yang dilakukan pemerintah desa, termasuk pelatihan untuk petugas agar lebih efektif menjelaskan program kepada lansia. Inisiatif ini juga mencakup penggunaan metode seperti kunjungan rumah untuk memberikan penjelasan secara langsung, yang terbukti lebih dapat diterima oleh para lansia. Pemerintah desa juga telah mengambil inisiatif untuk meningkatkan efektivitas komunikasi melalui pemanfaatan pertemuan informal, dan penggunaan teknologi komunikasi seperti grup WhatsApp untuk koordinasi petugas.

5) Dampak Komunikasi

Dampak komunikasi mengungkapkan bahwa kualitas komunikasi yang baik memiliki korelasi langsung dengan keberhasilan penyaluran bantuan. Di wilayah yang memiliki saluran komunikasi yang efektif, penyaluran bantuan cenderung lebih tepat sasaran dan tingkat kepuasan penerima manfaat lebih tinggi. Sebaliknya, di daerah dengan komunikasi yang kurang baik, masih banyak lansia yang tidak terjangkau program, sehingga merugikan mereka yang memang membutuhkan bantuan tersebut.

B. Sumber Daya

1) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia menjadi isu krusial, di mana jumlah tenaga pelaksana yang terbatas dan kurangnya pelatihan yang memadai untuk mereka menyebabkan beban kerja yang tinggi dan distribusi bantuan yang kurang optimal. Banyak petugas belum memiliki pengalaman yang cukup, sehingga menghambat efektivitas pelaksanaan program. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia juga berdampak pada kurangnya pendampingan dan monitoring terhadap penerima bantuan, yang

seharusnya menjadi bagian penting untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan digunakan sesuai tujuan. Akibatnya, sering terjadi ketidakmerataan dalam penyaluran bantuan, di mana beberapa kelompok penerima justru terabaikan atau tidak tercatat dalam data.

2) Sumber Daya Finansial

Meskipun anggaran untuk program bantuan sosial tersedia, sering terjadi keterlambatan dalam pencairannya, yang mengakibatkan penundaan dalam penyaluran bantuan. Selain itu, biaya operasional tambahan yang tidak tercover sering mempersulit pengelolaan anggaran secara efektif. Keterlambatan pencairan dana ini biasanya disebabkan oleh prosedur birokrasi yang rumit dan berbelit-belit, mulai dari proses pengajuan, verifikasi, hingga persetujuan dari berbagai instansi terkait. Hal ini tidak hanya menghambat distribusi bantuan, tetapi juga menimbulkan ketidakpuasan di kalangan penerima manfaat, yang seringkali sudah berada dalam kondisi yang membutuhkan bantuan segera.

3) Sumber Daya Informasi

Banyak lansia dan keluarganya yang belum sepenuhnya memahami prosedur dan kebijakan bantuan sosial. Informasi terkadang tidak sampai dengan baik, atau bahkan disampaikan secara tidak akurat, yang bisa menyebabkan kebingungan dan kesalahpahaman di kalangan masyarakat. Hal ini seringkali terjadi karena kurangnya sosialisasi yang efektif dan merata, terutama di daerah-daerah terpencil atau bagi lansia yang memiliki keterbatasan akses terhadap teknologi dan media informasi. Akibatnya, banyak lansia yang tidak mengetahui cara mendaftar, kriteria penerima bantuan, atau bahkan keberadaan program itu sendiri.

4) Sumber Daya Waktu

Prosedur verifikasi dan administrasi yang memerlukan waktu lama, terutama ketika ada kendala dokumen atau perubahan kebijakan mendadak, sering kali mengakibatkan keterlambatan dalam distribusi bantuan. Jika tidak ada perbaikan dalam hal manajemen waktu dan efisiensi operasional, maka program ini akan sulit mencapai efektivitas yang diharapkan. Keterlambatan ini tidak hanya berdampak pada ketepatan waktu penyaluran bantuan, tetapi juga dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah. Lansia, sebagai kelompok rentan yang sangat bergantung pada bantuan ini, seringkali menjadi pihak yang paling dirugikan karena mereka membutuhkan bantuan tersebut untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.

C. Disposisi

1) Sikap dan Komitmen Pelaksana Program

Sikap dan komitmen pelaksana program sangat krusial, di mana para petugas menunjukkan dedikasi tinggi terhadap tugas mereka meskipun dengan segala keterbatasan. Komitmen ini tampak dari upaya mereka untuk memastikan bahwa bantuan disalurkan tepat sasaran dan tepat waktu. Selain itu, para pelaksana program juga seringkali berinisiatif mencari solusi kreatif ketika menghadapi hambatan di lapangan, seperti kondisi geografis yang sulit dijangkau atau keterbatasan infrastruktur. Mereka tidak segan untuk bekerja melebihi jam kerja yang ditentukan dan bahkan menggunakan sumber daya pribadi demi kelancaran program. Hal ini mencerminkan rasa tanggung jawab yang besar dan kesadaran bahwa keberhasilan program bergantung pada kinerja mereka sebagai ujung tombak implementasi kebijakan di tingkat masyarakat.

2) Respon Terhadap Tantangan dan Hambatan

Para pelaksana menunjukkan kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi sulit, seperti keterlambatan dalam pencairan anggaran atau perubahan kebijakan di tingkat pusat. Mereka berusaha mencari solusi kreatif dan efisien untuk mengatasi masalah yang muncul, meski terkadang hal ini memerlukan waktu dan usaha ekstra. Kemampuan adaptasi ini juga tercermin dari kesiapan mereka dalam mengatasi kondisi di lapangan yang sering berbeda dari perencanaan awal. Mereka mampu melakukan penyesuaian strategi implementasi sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat setempat, sehingga program dapat berjalan dengan lebih efektif.

3) Hubungan Dengan Penerima Manfaat

Hubungan dengan penerima manfaat juga menjadi salah satu aspek penting. Para pelaksana berupaya membangun komunikasi yang baik dengan lansia dan keluarganya, untuk memahami kebutuhan dan kekhawatiran mereka. Ini penting agar mereka dapat memberikan bantuan yang sesuai dan responsif terhadap situasi yang dihadapi oleh penerima manfaat. Pelaksana program ini memperlakukan lansia dengan ramah, sabar, dan penuh empati, serta terbuka terhadap masukan dari mereka. Pendekatan humanis ini tidak hanya mempermudah penyaluran bantuan, tetapi juga membangun kepercayaan yang menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan program. Melalui interaksi yang berkualitas, para pelaksana seringkali mampu mengidentifikasi kebutuhan tersembunyi yang mungkin tidak terdeteksi melalui pendataan formal.

4) Koordinasi dan Kolaborasi Antar Pihak

Koordinasi dan kolaborasi antar pihak dalam program ini diakui sebagai faktor penentu keberhasilan. Pelaksana program aktif menjalin kerja sama dengan puskesmas, LSM, dan tokoh masyarakat untuk meningkatkan kualitas program. Pendekatan multi-stakeholder ini memungkinkan terjadinya sinergi yang mengoptimalkan berbagai sumber daya yang tersedia di masyarakat. Puskesmas berkontribusi dalam aspek layanan kesehatan, LSM menyediakan pendampingan dan advokasi, sementara tokoh masyarakat membantu dalam sosialisasi dan memobilisasi dukungan warga. Melalui pertemuan koordinasi rutin, berbagai pihak ini dapat menyamakan persepsi, mengidentifikasi tantangan bersama, dan merumuskan solusi kolektif.

5) Motivasi dan Etos Kerja

Motivasi dan etos kerja para pelaksana tampak kuat, meskipun mereka menghadapi tantangan. Sebagian besar dari mereka memiliki keinginan untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat, dan ini memengaruhi kualitas layanan yang diberikan. Relawan dan kader posyandu memiliki motivasi tinggi untuk membantu lansia, yang tercermin dari dedikasi dan inisiatif mereka. Motivasi intrinsik ini seringkali menjadi modal utama yang menggerakkan mereka untuk terus bertahan meskipun dengan insentif yang terbatas. Banyak di antara mereka yang memaknai pekerjaan ini bukan sekadar sebagai tugas, melainkan sebagai panggilan untuk berkontribusi pada kesejahteraan komunitas.

6) Evaluasi dan Perbaikan Lanjutan

Evaluasi dan perbaikan berkelanjutan juga ditekankan, di mana pelaksana menyadari bahwa setiap program memerlukan tinjauan berkala untuk mengidentifikasi kelemahan dan mencari langkah perbaikan yang tepat. Dengan melakukan evaluasi secara teratur, mereka dapat meningkatkan kemampuan dan efektivitas implementasi program, sehingga layanan kepada masyarakat, terutama lansia, semakin berkualitas dan memenuhi harapan. Proses evaluasi ini tidak hanya bersifat formal melalui rapat-rapat evaluasi dan pelaporan, tetapi juga melalui refleksi personal dan diskusi informal di antara para pelaksana. Mereka aktif mengumpulkan umpan balik dari para lansia dan keluarganya, serta menganalisis data-data implementasi untuk mengidentifikasi pola dan tren. Pembelajaran dari pengalaman ini kemudian diterjemahkan menjadi penyesuaian strategi dan pendekatan yang lebih responsif terhadap kebutuhan di lapangan.

D. Struktur Birokrasi

1) Hierarki dan Pembagian Tugas Yang Jelas

Hierarki dan pembagian tugas yang jelas menjadi landasan utama dalam operasional, di mana tanggung jawab setiap pihak, mulai dari kepala desa hingga petugas lapangan, telah ditetapkan dengan rinci. Hal ini memastikan bahwa setiap individu mengetahui peran dan tugasnya, sehingga mengurangi kemungkinan tumpang tindih dan kebingungan dalam proses kerja. Kepala Desa sebagai penanggung jawab utama, Kasi Kesra bertugas mendata dan mendistribusikan bantuan, sementara kader posyandu dan relawan bertugas memantau kondisi lansia. Struktur yang terorganisir ini memungkinkan program bantuan sosial berjalan lebih terarah dan terukur, karena setiap tahapan pelaksanaan memiliki penanggung jawab yang jelas. Namun, meskipun pembagian tugas telah dirancang dengan baik, masih

terdapat tantangan dalam implementasinya. Misalnya, koordinasi antar pihak terkadang kurang optimal, terutama ketika terjadi perubahan kebijakan atau situasi mendesak yang membutuhkan respons cepat.

2) **Prosedur dan Mekanisme Kerja Yang Terstandarisasi**

Prosedur dan mekanisme kerja yang terstandarisasi juga diterapkan dengan seksama. Prosedur ini mencakup semua tahap, mulai dari pendataan hingga distribusi bantuan, yang telah dituangkan dalam panduan yang jelas, sehingga mempercepat proses dan meminimalisir kesalahan. Prosedur pendataan lansia dan distribusi bantuan telah diatur dengan jelas, melibatkan kader posyandu, RT/RW, dan Kasi Kesra. Standardisasi ini memberikan kerangka kerja yang konsisten bagi semua pelaksana di berbagai wilayah, sekaligus menjamin transparansi dan akuntabilitas program. Meskipun prosedur yang baku diterapkan, para pelaksana tetap diberikan ruang untuk melakukan penyesuaian teknis sesuai dengan kondisi spesifik di lapangan, selama tidak mengubah prinsip dasar dan tujuan program. Pendokumentasian yang rapi dari setiap tahapan proses juga memudahkan pelacakan dan verifikasi, yang sangat penting dalam pengelolaan program bantuan sosial.

3) **Koordinasi Antar Unit Yang Efektif**

Koordinasi antar unit yang efektif menjadi aspek krusial dalam melaksanakan program. Para pelaksana program secara rutin berkomunikasi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk instansi kesehatan dan organisasi masyarakat, untuk memastikan bahwa informasi dan sumber daya dapat saling mendukung, sehingga proses distribusi bantuan dapat berjalan lebih lancar. Terdapat koordinasi yang baik antara Kepala Desa, perangkat desa, kader posyandu, dan pihak eksternal seperti puskesmas dan pemerintah kabupaten. Efektivitas koordinasi ini didukung oleh adanya jalur komunikasi yang jelas dan mekanisme pertemuan berkala yang terjadwal dengan baik. Rapat koordinasi tidak hanya menjadi wahana untuk berbagi informasi, tetapi juga forum untuk pemecahan masalah secara kolektif dan pengambilan keputusan yang inklusif.

4) **Sistem Pelaporan dan Monitoring yang Terstruktur**

Sistem pelaporan dan monitoring yang terstruktur memungkinkan pemerintah desa untuk memantau dan mengevaluasi perkembangan program secara berkala. Kader posyandu dan kepala dusun secara rutin melaporkan kondisi lansia yang menerima bantuan serta bagaimana distribusi berjalan, sehingga tindakan korektif dapat diambil jika diperlukan. Pelaporan ini mencakup tidak hanya aspek kuantitatif seperti jumlah penerima dan besaran bantuan yang disalurkan, tetapi juga aspek kualitatif seperti perubahan kondisi kesejahteraan lansia dan tantangan-tantangan yang dihadapi di lapangan. Data yang terkumpul melalui sistem monitoring ini menjadi basis yang kuat untuk pengambilan keputusan berbasis bukti dan perencanaan program ke depan. Format pelaporan yang seragam dan terjadwal memudahkan proses agregasi dan analisis data di tingkat kecamatan maupun kabupaten, sehingga gambaran makro tentang efektivitas program dapat diperoleh.

5) **Alokasi Sumber Daya dan Infrastruktur Pendukung**

Alokasi sumber daya dan infrastruktur pendukung yang memadai juga berkontribusi pada efektivitas program. Dengan penyediaan anggaran yang tepat dan fasilitas yang memadai, seperti kantor desa dan pusat layanan, proses operasional menjadi lebih efisien. Sumber daya, seperti anggaran dan tenaga kerja, dialokasikan dengan baik untuk mendukung program. Kantor Desa dan posyandu lansia menjadi pusat koordinasi dan layanan utama, di mana masyarakat dapat mengakses informasi, mendaftar, atau mengajukan keluhan terkait program bantuan sosial. Fasilitas ini juga berfungsi sebagai tempat pertemuan dan pelatihan bagi petugas lapangan, sehingga memudahkan koordinasi dan peningkatan kapasitas tim.

6) **Transparansi dan Akuntabilitas Yang Tinggi**

Transparansi dan akuntabilitas yang tinggi di semua tingkat memberi kepercayaan kepada masyarakat terhadap pelaksana program. Setiap tahapan kegiatan, mulai dari pendataan hingga penyaluran, dilakukan secara terbuka, dan informasi tersebut dapat diakses oleh masyarakat, yang

mengurangi kemungkinan penyalahgunaan dan meningkatkan partisipasi penerima manfaat. Setiap tahapan program, dari pendataan hingga distribusi, dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat. Pelaksana program bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Selain itu, adanya mekanisme pengawasan dan evaluasi yang ketat semakin memperkuat transparansi dalam pelaksanaan program. Dengan adanya laporan berkala dan keterlibatan berbagai pihak, seperti lembaga independen, media, serta masyarakat, setiap proses dapat diawasi dengan baik. Pengaduan dan masukan dari masyarakat juga menjadi elemen penting dalam memastikan program berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

PENUTUP KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Program Bantuan Sosial dalam Pemenuhan Kebutuhan Lansia di Desa Kasiyan Kabupaten Jember dapat diterapkan dengan menggunakan Teori George C. Edward III dengan menggunakan beberapa dimensi diantaranya

Komunikasi: kejelasan informasi, koordinasi antar pihak, hambatan komunikasi, upaya peningkatan komunikasi, dampak komunikasi

Sumber Daya: sumber daya manusia, sumber daya finansial, sumber daya informasi, sumber daya waktu.

Disposisi: sikap dan komitmen pelaksana program, respons terhadap tantangan dan hambatan, hubungan dengan penerima manfaat, koordinasi dan kolaborasi antar pihak, motivasi dan etos kerja, evaluasi dan perbaikan berkelanjutan.

Struktur Birokrasi: hierarki dan pembagian tugas yang jelas, prosedur dan mekanisme kerja yang terstandarisasi, koordinasi antar unit yang efektif, sistem pelaporan dan monitoring yang terstruktur, alokasi sumber daya dan infrastruktur pendukung, transparansi dan akuntabilitas yang tinggi.

Dengan menerapkan beberapa dimensi tersebut Implementasi Program Bantuan Sosial dalam Pemenuhan Kebutuhan Lansia dapat lebih efektif sehingga dapat memengaruhi kualitas pelayanan publik yang ada.

Saran

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan, dan oleh karena itu diberikan saran untuk penelitian selanjutnya. Pertama, penelitian ini mungkin memiliki jangkauan yang terbatas, hanya berfokus pada satu desa, yaitu Desa Kasiyan. Oleh karena itu, disarankan agar penelitian selanjutnya dapat mencakup beberapa desa lain yang menerapkan program bantuan sosial untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas. Hal ini akan memungkinkan peneliti untuk membandingkan efektivitas dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program di berbagai konteks. Selain itu, peneliti juga dapat mempertimbangkan untuk melibatkan lebih banyak pihak, seperti pihak pemangku kepentingan, organisasi non-pemerintah, dan komunitas lokal, dalam penelitian mereka agar dapat memperoleh data yang lebih komprehensif.

Untuk objek penelitian, disarankan agar pemilihan sampel dilakukan dengan lebih bervariasi, termasuk melibatkan lansia dari berbagai latar belakang sosial-ekonomi. Penelitian juga dapat mengeksplorasi aspek-aspek lain yang mungkin berpengaruh terhadap keberhasilan program bantuan sosial, seperti persepsi masyarakat terhadap program, faktor budaya, dan dukungan keluarga. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian selanjutnya dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap pengembangan kebijakan dan praktik dalam menjalankan program bantuan sosial yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan lansia di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustine, Y. F., & Handoyo, P. (2022). Pengaruh Pemberian Program Bantuan Sosial Tunai Terhadap Derajat Kualitas Hidup Lanjut Usia. *Era Baru Post Pandemic*, 11(1), 16–32. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/paradigma/article/view/46572>
- Anta Kusuma, I. G. K. C. B., & Simanungkalit, Y. T. S. (2022). Implementasi Insentif Pajak Menurut Model G Edward III. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(2), 236–248. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i2.1523>
- Daerah, P. (2015). *Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang DESA*. [https://peraturan.bpk.go.id/Download/34519/PENGUNDANGAN PERDA DESA VERSI HUKUM.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/34519/PENGUNDANGAN%20PERDA%20DESA%20VERSI%20HUKUM.pdf)
- III, G. C. E. (1980). Enhancing women contribution in peace, conflict resolution and security agenda: Indonesian female peacekeepers in the United Nations peacekeeping operations (garuda contingent-konga). In *Revista UNISCI* (Vol. 2020, Issue 53, pp. 111–129). <https://doi.org/10.31439/UNISCI-86>
- Kasiyan, D. (2024). *Profil Desa Kasiyan*. Kompasiana.Com. <https://www.kompasiana.com/kknposko209163/66cfe614c925c42eb03ae323/profil-desa-kasiyan>
- Katriana. (2019). *Peneliti dorong peningkatan tujuh dimensi bagi kesejahteraan lansia*. Antara News. <https://www.antarane.ws.com/berita/1102732/peneliti-dorong-peningkatan-tujuh-dimensi-bagi-kesejahteraan-lansia>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis. A Methods Sourcebook 3rd Edition*. In *Sage Publication*.
- Peraturan Kepala Desa Kasiyan No.4 Tahun 2020 (2020).
- Rangkuti, M. (2024). *Jadwal Pencairan Bansos Untuk Lansia 2024*. Fahum Umsu. <https://fahum.umsu.ac.id/blog/jadwal-pencairan-bansos-untuk-lansia-2024/>
- Timur, K. (2020). *Kependudukan: Desa Kasiyan Timur terakhir ini*. Kasiyantimur.Id. <https://kasiyantimur.id/2020/01/08/kependudukan-desa-kasiyan-timur-terakhir-ini/>
- TNP2K. (2020). Situasi Lansia di Indonesia dan Akses terhadap Program Perlindungan Sosial: Analisis Data Sekunder. In *TNP2k* (Vol. 10, Issue 2). [http://tnp2k.go.id/download/87694Laporan Studi Lansia - Analisis Data Sekunder.pdf](http://tnp2k.go.id/download/87694Laporan%20Studi%20Lansia%20-%20Analisis%20Data%20Sekunder.pdf)
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, Pub. L. No. 11, 191 (2009). [https://peraturan.bpk.go.id/Download/27869/UU Nomor 11 Tahun 2009.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/27869/UU%20Nomor%2011%20Tahun%202009.pdf)
- Wahyudi, M. Z. (2024). *31 Juta Lansia, Mau Apa?* Kompas.Id. <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2024/05/28/31-juta-lansia-mau-apa>
- Wahyuni, W. (2022). *Mengenal Lebih dalam Kebijakan Publik dan Implementasinya*. Hukumonline.Com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-lebih-dalam-kebijakan-publik-dan-implementasinya-lt6344ff556ce16/>
- Widiprana, R. B., Ludigdo, U., & Rosidi, R. (2017). Implementasi Kebijakan Publik Pelaporan Pemerintah Berbasis Akruar (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 3(2), 122–133. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2017.003.02.5>
- Yaw, A. La. (2008). Konsep Dasar Kebijakan Publik. *Atmospheric Environment*, 42(13), 2934–2947.